

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi *concern* dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (zis).¹

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.²

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (STIM YKPN: Yogyakarta, 2011) h. 6.

² Andriana Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 25.

Sebagaimana fungsi bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Bank menerima titipan dan memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, memberikan keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah.³

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad *salam*, akad *istisna*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴

Dari penjelasan di atas bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk bank konvensional. Ini

³ Andriana Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*,....., h. 40.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 83b.

memungkinkan produk bank syariah memberi peluang yang luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perbankan Syariah dapat tampil sebagai alternatif, karena sejalan dengan emosi keagamaan masyarakat Banten yang sebagian besar beragama Islam dengan jumlah penduduk di tahun 2013 berjumlah 11.452491 jiwa dan 93,27% adalah beragama Islam⁵, sejalan dengan semakin berkembangnya pertumbuhan perbankan syariah di provinsi Banten, sehingga umat islam Banten dapat memanfaatkan jasa-jasa perbankan syariah seoptimal mungkin.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Perbankan Syariah Menurut Jenisnya
di Provinsi Banten 2012-2013⁶

Jenis	2011	2012	2013
Bus	84	123	115
UUS	31	43	79
BPRS	8	8	15
Jumlah	123	174	209

Perkembangan perbankan syariah di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2011-2013 mengalami peningkatan hal ini membuktikan perkembangan bank syaria'h di Banten yang terus meningkat. Selain itu disektor non-keuangan pun pengusaha-pengusaha Banten sudah sadar terhadap sistem ekonomi syariah sebagai sistem yang pantas untuk diterapkan.

Eksistensi sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi

⁵ www.Bps Banten.co.id, diakses pada tanggal 8 Februari 2016

⁶ www.BI.go.id ,diakses pada tanggal 10 Februari 2016

disektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*).⁷

Dengan konsep ini memberi peluang bagi usaha sektor UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah. Dengan tumbuhkembangnya UMKM membuat usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar, karena UMKM juga menjadi ujung tombak bagi perusahaan besar dalam mendistribusikan produknya. UMKM jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memberi penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sebagai perbandingan pengalaman negara Taiwan justru menunjukkan ekonominya dapat tumbuh pesat karena di topang oleh sejumlah usaha kecil dan menengah yang disebut *community based industry*. Perkembangan industri modern di negara Taiwan, yang sukses menembus pasar global, ternyata didukung oleh kontribusi usaha kecil dan menengah (UKM) yang dinamis. Keterkaitan yang erat antara si besar dan si kecil lewat program

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,...h. 1.

subcontracting terbukti mampu menciptakan sinergi yang menopang perekonomian Taiwan.⁸

Melakukan pemberdayaan melalui UMKM yang berarti pula memperkuat perekonomian nasional. Alasannya instrumen kebijakan ekonomi kerakyatan akan selalu didasarkan pada prinsip mendahulukan keadilan, kemudian kemakmuran (*equity with growth approach*), bukan kemakmuran baru keadilan (*tricking-down effect approach*).⁹

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya, dan Sumber Daya Modal.

Secara statistik, pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nominal. Dalam kurun waktu 2012-2013, secara nominal PDRB Provinsi Banten bertambah 31,16 triliun rupiah, dari 213,19 triliun pada tahun 2012

⁸ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h. 379.

⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 41.

menjadi 244,35 triliun rupiah pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 11,96%.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Sektor UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tingkat jumlah dana pihak ketiga yang terkumpul di perbankan syariah Provinsi Banten yang memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam yang belum sebanding.
2. Kontribusi perbankan syariah terhadap penguatan modal pada sektor UMKM
3. Bantuan modal menjadi salah satu hambatan perkembangan UMKM
4. Tingkat pengaruh lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti hanya membatasi masalah pada hal-hal sebagai berikut:

¹⁰ Pertumbuhan Ekonomi Banten (PDRB), Badan Pusat Statistik (BPS) Banten.

1. Melihat jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah di Banten periode 2012-2014 data perbulan.
2. Melihat jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Banten periode 2012-2014 data perbulan.
3. Melihat jumlah kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pembiayaan sektor UMKM periode 2012-2014 data perbulan.
4. Pertumbuhan ekonomi di Banten yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2012- 2014 data perbulan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah ditemukan di atas, maka masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten?
3. Berapa besar pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap pembiayaan sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM di Provinsi Banten?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten?
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap pembiayaan sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Perbankan Syariah
Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi kebijakan Perbankan Syariah dalam memberikan pembiayaan pada sektor UMKM yang lebih membutuhkan modal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Bagi Penulis
Menambah wawasan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan dengan permasalahan di lapangan sebenarnya.

3. Bagi Pihak Kampus

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi Syariah pada Jurusan Ekonomi Islam pada Pasca Sarjana IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

G. Penelitian Terdahulu

Saat ini telah banyak hasil penelitian yang berusaha mengkaji secara empiris dengan cara mengeksplorasi indikator-indikator yang lebih spesifik untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara sector keuangan dan pertumbuhan ekonomi. setidaknya ada empat kemungkinan pendekatan yang bisa menjelaskan hubungan sebab akibat antara keuangan dan pertumbuhan yaitu: 1) Keuangan adalah factor penentu pertumbuhan ekonomi (*finance-led growth hypothesis*) atau biasa disebut “*supply-leading view*”, 2) Keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi (*growth-led finance hypothesis*) atau biasa disebut “*demand-following view*”, 3) Hubungan saling mempengaruhi antara keuangan dan pertumbuhan atau biasa disebut “*the bidirectional causality view*”, dan 4) Keuangan dan pertumbuhan tidak saling berhubungan atau biasa disebut “*the independen hypothesis*”.¹¹

1. Penelitian tentang pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi, dengan metode kuantitatif analisis korelasi untuk mengetahui hubungan pembiayaan perbankan

¹¹ Jurnal: etikonomi, fol. 12, no. 1 April 2013, h. 6.

syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan data time series jumlah pembiayaan yang diberikan dan jumlah PDriil, hasil penelitian adalah adanya hubungan dan pengaruh positif dari pembiayaan yang diberikan oleh bank Riau syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil empiris membuktikan dengan semakin sering Bank Riau syariah memberikan pembiayaan maka tingkat pertumbuhan pun meningkat. Melalui bentuk-bentuk produk dan layanan sesuai dengan syariah.¹²

2. Penelitian tentang peran bank perkreditan rakyat syariah dalam pengembangan UMKM dan agribisnis pedesaan studi di Sumatera Barat, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan produktif yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah pembiayaan usaha mikro kecil menengah berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai produksi usaha mikro kecil menengah.¹³
3. Penelitian yang menguji hubungan dinamis antar perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan uji kointegrasi dan *Vector Error Model (VECM)* menggunakan data *time series*. Penelitian ini untuk melihat apakah sistem keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang mentransformasi operasional

¹² Beni Eko Nandar, *Pembiayaan Bank Riau Syariah (BPD Riau) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

¹³ Sri Maryati, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat*, *Journal of Economic and Economic Education* Vol 3 No1.

sistem perbankan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antar sektor perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi, ini menunjukkan secara empiris bahwa kehadiran perbankan syariah tidak hanya secara teoritis dan ideologis dapat mendinamiasi aktivitas perekonomian, tetapi teori ini dapat dibuktikan secara empiris dalam lingkup perbankan syariah dan sektor ekonomi di Indonesia. menemukan adanya hubungan *bi-directional causality* antara perkembangan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan hipotesis “*the feedback hypothesis*” atau “*the bidirectional causality view*”. Hasil empiris membuktikan bahwa pertumbuhan perbankan syariah dapat mendorong ekspansi ekonomi yang tinggi melalui bentuk-bentuk produk dan layanan yang sesuai syariah.¹⁴

H. Kerangka Teori

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Karena itu, dalam transaksi penghimpunan dana simpanan berupa giro dan tabungan, serta investasi dana dalam bentuk deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa pembiayaan oleh bank syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur tersebut adalah

¹⁴ Ali Rama, *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi 2013.

menimbulkan penganiayaan (zalim) bagi pihak lainnya, suatu hal yang dilarang.¹⁵

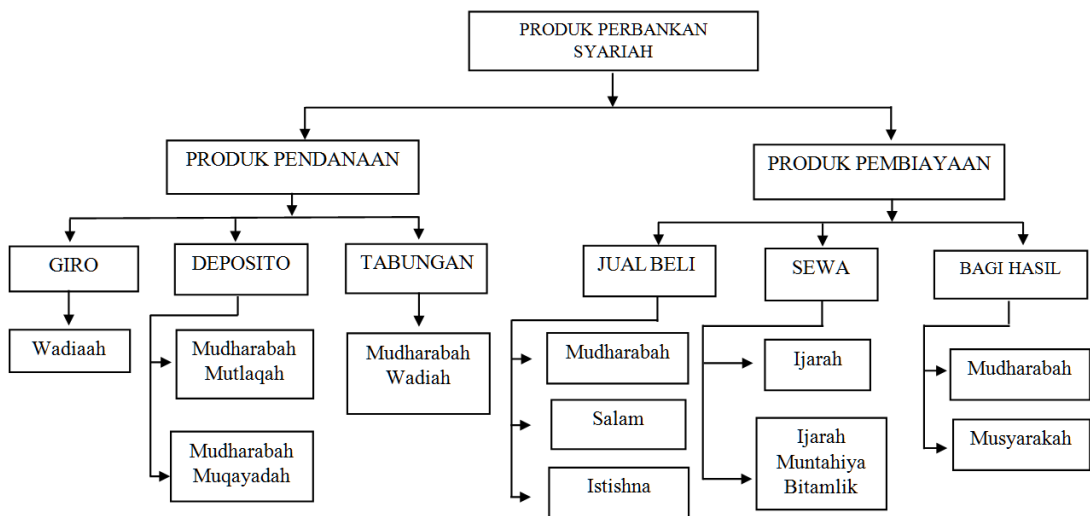
Sebagaimana dalam Firman Allah Q. S Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S Al-Baqarah: 279)*¹⁶

Gambar 1.1

Produk-produk Bank Syariah¹⁷



¹⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 62.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman...*, h. 47.

¹⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali,2011), h. 45.

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah Islam. Penghimpunaan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad wadiah dan mudharabah. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad wadiah dan bagi hasil untuk akad mudharabah.¹⁸

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.¹⁹

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam:

¹⁸ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 52.

¹⁹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,... h. 97.

1. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan
2. Produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif , yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.²⁰

Pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM karena lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha (proyek) ketimbang nilai agunan, sementara faktor ini (agunan) untuk sebagian besar sebagai penghambat UKM akses terhadap perbankan konvensional, bukan karena UKM tidak memiliki asset melainkan asset yang ada dinilai tidak *bankable*.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang menguasai industri-industri di Indonesia yakni lebih dari 90%. Dengan demikian begitu banyak perputaran uang dalam area bisnis ini. Apabila penyedia pembiayaan pada UMKM ini bukan dari

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 200.

Perbankan Syariah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak kedhaliman dalam aktivitas kredit yang ada. Lembaga-lembaga non formal yang mengambil kesempatan ini seperti Lintah Darat memberikan jumlah bunga yang tidak menyesuaikan dengan kondisi rugi laba UMKM dan berdampak pada ketidaktumbuhannya UMKM.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” (QS. An Nisa: 29)²¹

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ اِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ ۙ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
 الْخٰطِاِءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوْا
 الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ ۗ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنْمَآ فَتَنَّهُ فَاِستَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu berbuat dhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” (QS. Shod: 24)²²

²¹ Departemen Agama RI, Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman..., h. 83.

²² Departemen Agama RI, Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman, h. 454.

UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, sebuah kondisi yang strategis pembiayaan perbankan syariah pada UMKM yang mampu menjadi sarana kesejahteraan rakyat. Jumlah unit usaha yang banyak ini biasanya bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٣﴾

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.” (QS Al Maidah: 2)²³

Dari pihak penyedia pembiayaan sendiri (Perbankan Syariah), melalui program ini akan meminimalisir risiko kredit macet karena kepatuhan nasabah usaha kecil lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar sehingga tingkat kemacetannya relatif kecil. Selain itu pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran resiko, nominal kredit UMKM umumnya kecil dengan jumlah nasabah yang besar sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok/sektor usaha.

UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari kalangan masyarakat dengan keterjangkauan modal yang minim. Namun, bukan berarti dari ketersediaan modal yang minim, kemudian tidak akan menciptakan suatu perubahan taraf hidup yang pesat. Sebab, segala usaha tidak harus selalu dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang banyak atau besar. Banyak para

²³ Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman*, h. 106.

pengusaha berangkat dari modal sedikit, tetapi dengan semangat dan kreativitas mereka dapat membangun kerajaan bisnisnya hingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.²⁴

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya atas dasar harga berlaku dan konstan.²⁵

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan

²⁴ Gatut Susanta, M Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah mendirikan dan mengelola UMKM*, (Jakarta: Raih Asa Sukses), h.13.

²⁵ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2005), h. 18.

kesempatan kerja itu hanya bisa dicapai dengan peningkatan *output agreget*, (barang dan jasa) atau PDB yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan PN²⁶.

Para Ekonom terdahulu seperti Harrod (1939) dan Domar (1947), Harrod mengemukakan teorinya dalam *Economic journal*, Domar mengemukakan teorinya pertama kali dalam *Journal American Economic Riview*. Teori Harrod-Domar memberikan kunci kepada investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Berpengaruh terhadap permintaan agregat, yaitu melalui penciptaan pendapatan dan terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Harrod-Domar mengembangkan teorinya berdasarkan beberapa asumsi antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa *aggregate supplay* dan *aggregate demand* akan seimbang jika investasi pada suatu periode tertentu (It) sama dengan perubahan pendapatan nasional, dimana nilai modal dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit *output* dengan nilai tertentu dalam suatu periode.
2. Bahwa pada kondisi keseimbangan dalam suatu ekonomi tertutup maka investasi akan sama dengan tabungan pada periode tersebut atau dapat dikatakan besarnya tabungan masyarakat proposional besarnya dengan pendapatan nasional.²⁷

Teori Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin

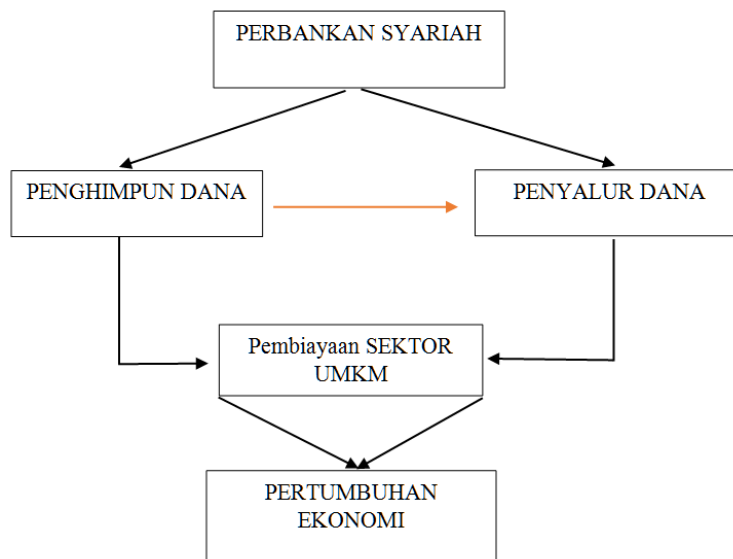
²⁶ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 41.

²⁷ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 57.

banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh kenaikan output yang disebabkan dan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama.²⁸

Dari para ekonom terdahulu di atas Harrod (1993), Domar (1946) dan Schumpeter bahwa untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan maka diperlukan peningkatan investasi baru, sehingga rasio tabungan nasional dan pendapatan nasional menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini intermediasi sektor keuangan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



²⁸ Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2004), h. 70.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dikelompokkan menjadi 5 bab dan setiap bab dikelompokkan dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi landasan teori atau kajian teoritis pendokumentasian atau pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan landasan teori. Kajian Teoritis ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustak membahas tentang Perbankan Syariah dan Ruang lingkupnya, UMKM dan Ruang lingkupnya, dan Pertumbuhan Ekonomi dan Ruang lingkupnya. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulis untuk menteorikan hubungan variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian, melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Uji Hipotesis.

Bab IV terdiri dari deskriptif data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis uji hipotesis uji t. uji hipotesis uji F, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi. Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis hasil yang disajikan secara jujur dan apa adanya.

Bab V Terdiri dari Kesimpulan dan Saran, berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang diajukan pada bab I, II, III dan IV. Kemudian terdapat saran yang dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dapat ditunjukkan kepada pengambil kebijakan, pengguna hasil penelitian, ataupun penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Al-Hadis.

2. Landasan Syariah Bank Syariah

a. Landasan Teologis

Al-Qur'an al-Karim Firman Allah Q.S al-Nisa (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

²⁹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

*dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁰

Al-Qur'an al-Karim Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*³¹

Al-Qur'an al-Karim Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*³²

b. Landasan Yuridis

Secara yuridis, legalisasi perbankan syari'ah mengacu pada Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan Syariah, bank syari'ah mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 adalah suatu aturan perijinan berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau keinginan lainnya yang

³⁰ Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman*, (Bogor : Sigma, 2007), h. 85.

³¹ Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman...*, h. 47.

³² Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman...*, h. 47.

dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lain (ijarah wa iqtina). Namun sebelum itu, pada 3 Agustus 2004, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan PBI No. 6/21/pbi/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (PBI GWM Syariah).³³

3. Ciri-ciri Bank Islam

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas wajar.
- b. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya hanya Allah semata yang mengetahui rugi-untungnya suatu proyek.

³³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2010), h. 169.

4. Produk-produk Bank Syaiah

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.

a) Giro Wadiah

Sedangkan yang dimaksud dengan giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam kaitannya dengan giro wadiah yad-dhamanah yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengann tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut namun diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.³⁴

³⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 341.

b) Giro Mudharabah

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

2) Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek.

a) Tabungan Wadiah

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut tetapi bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

3) Deposito Syariah

Deposito adalah Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai

mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

1) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan

2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

1) Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:³⁵

³⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan Keuangan....*, h. 686.

- a) Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi
 - (1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - (2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b) Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi
 - (1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun
 - (2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - (3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba) ada beberapa cara memberikan pembiayaan berdasarkan beberapa prinsip akad di antaranya:

2) Pembiayaan yang Berprinsip Jual Beli

Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli yang dikembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu *al-murabahah*, *al-*

istishna, dan *as-salam*. Masing-masing jenis akad jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. *Return* atas pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan margin keuntungan.³⁶

Landasan Syariah pembiayaan dengan prinsip jual beli terdapat dalam Al-Quran (Q.S Al-Baqarah: 275)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³⁷...

a) Pembiayaan Murabahah

Bai'al murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.³⁸

b) Pembiayaan *Bai'as Salam*

Dalam pengertian sederhana *bai'as salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*..., h. 135.

³⁷ Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman*, (Bogor : Sigma, 2007), h. 47.

³⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*..., h. 23.

Landasan syariah transaksi *bai'as salam* terdapat dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah: 282)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”³⁹

c) Pembiayaan *Bai'as Salam Paralel*

Salam pararel adalah melaksanakan dua transaksi *bai'as salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (*Supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Pembiayaan *bai'as salam* aplikasi dalam perbankan biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, maka dilakukan akad *bai' as salam* kepada pembeli kedua, misalnya seperti bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang disebut *bai'as salam paralel* dalam perbankan syariah⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI., *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman*...h. 48.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Tazkia Institute, 1999), h. 157.

d) Pembiayaan *Bai' al Istishna*

Transaksi *bai'al istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada penjual akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran akan dilakukan di muka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴¹

Pembiayaan *bai'al istishna* aplikasi dalam perbankan syariah di gunakan untuk pembiayaan konstruksi atau proyek atau produk manufaktur.

3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang berbentuk pembiayaan kerja sama usaha. Dalam pembiayaan kerjasama usaha, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan di terima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini dibedakan

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum...* h. 159.

menjadi dua jenis pembiayaan yaitu: pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dhrb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴²

Landasan syariah transaksi *mudharabah* terdapat dalam Al- Qur'an (Q.S Muzammil: 20)

... وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...;⁴³

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

⁴³ Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman*, h. 57.

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:⁴⁴

(1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau biasa disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specifield mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

b) *Pembiayaan Musyarakah*

Al-Musyarakah atau berasal dari kata *Syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.

Al-musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau satu untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik....*, h. 97.

Landasan syariah transaksi *musyarakah* terdapat dalam Al-Qur'an (Q.S Shaad 24)

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿٢٤﴾

... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh,⁴⁵

Jenis-jenis *al- musyarakah*

Al-musyarakah ada dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *Musyarakah* akad (kontrak) di antaranya jenis-jenis *musyarakah* sebagai berikut:⁴⁶

(1) *Syirkah al-inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, tetapi tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain, keuntungan di bagi persentase yang sudah disepakati. Jika mengalami kerugian resiko ditanggung bersama, dilihat dari persentase modal.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman* ..h. 454.

⁴⁶ Abdul Rahman Gazaly, et al. eds. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 133-134.

(2) *Syirkah al-mufawadhah*

Yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.

(3) *Syirkah al-wujuh*

Yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.

(4) *Syirkah mudharabah*

Yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seseorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, adapun kerugian di tanggung oleh pemilik modal saja.

(5) *Syirkah a'mal*

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

a) *Al-ijarah*

Pembiayaan *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk

pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.⁴⁷

Landasan syariah transaksi *ijarah* terdapat dalam Al-Quran (Q.S Al-Baqarah 233)

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁸

b) *Ijarah Muntahiya bittamlik*

Ijarah muntahia bittamlik adalah merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam *ijarah*

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 101.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman.*, h. 37.

muntahia bittamlik terjadi kepemindahan hak milik barang yaitu dengan cara:⁴⁹

- (1) *Ijarah* dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa
- (2) *Ijarah* dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa.

B. UMKM dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian UMKM

Tabel 2.1
Pengertian UMKM

Organisasi	Jenis Usaha	Keterangan Kriteria
Undang-Undang No.8/1985 tentang Usaha Kecil	Usaha Kecil	Asset <Rp 200 juta di luar tanah & bangunan: Omzet tahunan < Rp 1 miliar: dimiliki oleh orang Indonesia: Independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah-besar: Boleh berbadan hukum boleh tidak.
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah	Pekerja < 5 orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Pekerja 5-19 orang Pekerja 20-99 orang
Meneg Koperasi & PKM	Usaha Kecil (UU No.9?1995) Usaha Menengah (Inpres 10/1999)	Aset <Rp 200 juta di luar tanah & bangunan: Omset Rp 1 miliar. Aset Rp 200 juta-10 miliar
Bank Indonesia	Usaha mikro (Sk Dir BI No. 31/24 KEP/DIR Tgl 5 Mei 1998)	Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin dimiliki oleh keluarga: sumber daya local

⁴⁹Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*h. 155.

Organisasi	Jenis Usaha	Keterangan Kriteria
	Usaha Kecil (UU No. 9/1995) Menengah (SK Dir BI No.30?45/Dir/UK tgl 5 Januari 1997	dan tehknologi sederhana; Lapangan Usaha mudah untuk exit dan entry Aset <Rp 200 juta di luar tanah & bangunan untuk sektor non industry manufacturing; Omzet tahunan <Rp 3 milliar Aset <Rp 5 miliar untuk sektor Industri; Aset <Rp. 600 juta di luar tanah & bangunan untuk sektor non industry manufacturing; Omzet tahunan <Rp 3 miliar.
Bank Dunia	Usaha Mikro Kecil-Menengah	Pekerja < 20 orang Pekerja 20-150 orang: Asset < US\$ 500 ribu di luar tanah & bangunan.

2. UMKM dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, praktik ekonomi atau bisnis berkaitan erat dengan akidah dan syariah Islam. Keterkaitan dengan akidah /kepercayaan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya dengan mengindahkan perintah dan larangan Allah yang tercermin pada kegiatan halal atau haram.

Kegiatan usaha untuk mennghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen mempunyai peran penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk berkerja keras dalam mencari kehidupan agar mereka dapat

melangsungkan kehidupannya dengan baik.⁵⁰ Seperti dalam Q.S Al-Qashash ayat 73:

وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

....supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya....(Q.S Al-Qashash: 73)

Terdapat beberapa prinsip ajaran agama dalam kontek pengembangan harta atau berusaha, antara lain:⁵¹

- a. Kehalalan. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas atau memperdagangkan hal-hal yang bersifat haram.
- b. Saling menerima dengan baik. Tidak dibenarkan jual beli dengan paksa.
- c. Keseimbangan. Keuntungan antara pembeli dan penjual haruslah seimbang.
- d. Kejelasan. Ini dimaksudkan agar interaksi tidak berpotensi melahirkan perselisihan/permusuhan. Dan persaingan yang sehat.

3. Karakteristik UMKM

- a. Karakteristik Usaha Kecil antara lain:
 - 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
 - 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.

⁵⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 111.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 23.

- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
 - 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - 5) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
 - 6) Sebagian besar sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
 - 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.⁵²
- b. Karakteristik Usaha Menengah antara lain:
- 1) Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
 - 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk oleh perbankan.

⁵² Julius R. Latummaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), h. 409.

- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
 - 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.
 - 5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
 - 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.⁵³
- c. Karakteristik Usaha Mikro antara lain:
- 1) Jenis barang/komoditi usahannya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
 - 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
 - 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - 4) Sumber daya manusiannya (pengusaha hanya) belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai.
 - 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
 - 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan nonbank.
 - 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.⁵⁴

⁵³ Julius R. Latummaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global...*, h. 409.

4. Persoalan atau Kendala dalam UMKM

Persoalan permodalan (aksesibilitas terhadap modal) ternyata merupakan masalah utama yang disebabkan beberapa alasan antara lain:

- a. Pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan dalam menyediakan agunan seperti yang ditentukan oleh bank.
- b. Pelaku usaha mikro dan kecil masih kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur peminjaman kredit seperti yang ditetapkan oleh bank.
- c. Pelaku usaha dan kecil merasa keberatan dengan beban suku bunga yang dirasakan terlalu tinggi.

Masyarakat yang melakukan aktivitas usaha di bidang UMKM menghadapi permasalahan finansial di antaranya:

- a. Kurangnya kesesuaian (terjadi *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.
- b. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
- c. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh procedural kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara kredit yang dikucurkan kecil.
- d. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank diplosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- e. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi

⁵⁴ Julius R. Latummaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global...*, h. 410.

- f. Banyak UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan *financial*.⁵⁵ Hal ini dapat di relefansikan dengan penelitian terdahulu yang relevan terkait peran perbankan syariah terhadap UMKM

Penelitian tentang kecilnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor UMKM hasil penelitian ini adalah: kecilnya kontribusi perbankan syariah terhadap UMKM dikarenakan beberapa faktor di antaranya 1) prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang dilakukan oleh dunia perbankan. Sehingga kegiatan menyalurkan kembali dana masyarakat dengan bentuk pembiayaan bertindak secara berhati-hati, cermat, teliti dan bijaksanaguna meminimalisir kemungkinan resiko yang tinggi. 2) bagi usaha usaha mikro kecil khususnya, kewajiban adanya jaminan sangat memberatkan karena mengingat usaha mikro kecil berdiri dengan modal yang tidak besar dan terbatas. 3) SDI (Sumber Daya Insani yang masih terbatas, ha ini disebabkan karena tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah kurang memadai, padahal keberhasilan pengembangan bank syariah terutama dalam hal pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. 4) kesadaran hukum dan budaya masyarakat

⁵⁵ Julius R. Latummaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global...*, h. 402.

(budaya hukum) yaitu bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kurang menyadari pentingnya menjadi unit usaha yang *bankable*. Usaha *bankable* disini adalah usaha yang layak untuk dibiayai antara lain usaha tersebut berbadan hukum (NPWP) dan memiliki pencatatan keuangan yang baik.⁵⁶ Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Jakarta, bogor dan depok dan beberapa wilayah lain di pulau jawa kualitas laporan keuangan UMKM masih rendah sehingga perbankan masih meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangannya.⁵⁷

Dalam pasal 8 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM Tentang aspek Pendanaan UMKM yaitu:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh U MKM.
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk

⁵⁶ Rizki Tri Anugrah Bakti, dkk., Jurnal, Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil, Universitas Brawijaya Malang, 2013. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

⁵⁷ Rizki Rudiantoro, Sylvia veronica Siregar, Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP, Universitas Indonesia, Vol 9-No 1 Juni 2012. Diakses Pada tanggal 20 Maret 2016.

keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.⁵⁸

Berdasarkan kendala yang dihadapi UMKM tersebut membutuhkan keterpaduan antara bantuan keuangan dari sektor perbankan dengan bantuan teknis/program pendampingan dari sektor riil yang berhubungan langsung dengan UKM juga menjadi salah satu syarat mutlak dalam upaya peningkatan keterkaitan antara lembaga keuangan dengan pelaku usaha. Dalam bahasa ekonomi politik. Pemberdayaan UKM memerlukan bantuan keuangan dan pendampingan secara bersamaan (*full pledge service*) yang tidak harus bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) dan langkah alternatif yang amat dibutuhkan oleh UKM di seluruh Indonesia.⁵⁹

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha nonmikro, antara lain perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan berkembang. UMKM tidak sensitif terhadap

⁵⁸ Leonardus Saiman, *Kewirausahaan Teori, Praktik, dan Kasus-kasus*, (Jakarta: Salemba empat, 2012), h.10.

⁵⁹ Bustanul Arifin, *Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 72.

suku bunga karena kelompok usaha ini tidak memiliki akses perbankan dan keuangan secara baik sehingga tetap berkembang walaupun dalam krisis ekonomi dan moneter; dan pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dandapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

C. Ruang Lingkup Pertumbuhan Ekonomi

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi didaerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*.⁶⁰ Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, diukur dengan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Brutto), dan menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan PN.

⁶⁰ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 47.

PDB dapat diukur dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dua pendekatan pertama tersebut adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat, sedangkan pendekatan pengeluaran adalah perhitungan PDB dari sisi permintaan agregat. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai output (NO) dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Berdasarkan satu digit, Biro Pusat Statistik (BPS) membagi ekonomi nasional ke dalam 9 sektor, yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalan, industry manufaktur, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Jadi PDB adalah jumlah NO dari ke Sembilan sektor tersebut.

$$PDB = \sum NO_i \quad i=1, 2, \dots, 9 \dots \dots \dots (1)$$

Sedangkan melalui pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor, seperti tenaga kerja (gaji/upah),

pemilik modal (bunga/hasil investasi), pemilik tanah (hasil jual/sewa tanah), dan pengusaha (keuntungan bisnis/perusahaan). Semua pendapatan ini dihitung sebelum dipotong oleh pajak penghasil dan pajak-pajak langsung lainnya. Dalam pendekatan ini, penghitungan PDB juga mencakup penyusutan dan pajak-pajak tidak langsung netto. Oleh sebab itu, dalam pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah dari nilai tambah brutto (NTB) dari kesembilan sektor tersebut:

$$PDB = NTB_1 + NTB_2 + \dots + NTB_9 \dots \dots \dots (2)$$

Adapun menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak berorientasi *profit/nirlaba* (C), pembentukan modal tetap domestik bruto, termasuk perubahan stok (I), pengeluaran konsumsi pemerintah (G), ekspor (X), dan impor (M):

$$PDB = C + I + G + X - M^{61} \dots \dots \dots (3)$$

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam tidak hanya aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materil dan spiritual manusia.

Penekanan di sini ialah bahwa pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana muslim klasik, yang dibahas dalam “pemakmuran Bumi” yang merupakan pemahaman dari firman Allah QS. Hud (11) ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...”⁶²

⁶¹ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 41.

⁶² Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman.*, h. 394.

Seperti yang dijelaskan oleh model Ibnu Khaldun yang menggambarkan hubungan antara rakyat akan berpengaruh terhadap syariah, akan berpengaruh terhadap pemerintah, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan atau ekonomi, akan berpengaruh terhadap keadilan akan berpengaruh terhadap pembangunan.

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohani masuk ke dalam pengertian *falah* ini. Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrument-instrumen wakaf, zakat dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.⁶³

2. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi dan Nonekonomi

a. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi:

⁶³ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 28.

- 1) Sumber alam faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah.
- 2) Akumulasi modal faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan ialah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi.
- 3) Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya
- 4) Kemajuan teknologi perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi.
- 5) Pembagian kerja dan skala produksi spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar selanjutnya membantu perkembangan industri⁶⁴.

b. Faktor Nonekonomi

- 1) Faktor sosial faktor social dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan ia menanamkan semangat membara yang menghasilkan penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru.

⁶⁴ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67-72.

- 2) Faktor manusia sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka, para ahli modern menyebutnya dengan pembentukan modal insani, yaitu “proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh, penduduk Negara yang bersangkutan. “Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan social pada umumnya.
- 3) Faktor politik dan administrasi. Faktor politik dan administrative juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi.⁶⁵

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Adam Smith (1723-1790)

Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Smith dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu: pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

⁶⁵ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, , h. 75.

Menurut Smith, unsur output total terdiri dari sumber daya alam yang tersedia, sumberdaya insani (jumlah penduduk), dan stok barang modal yang ada. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian.

Menurut Smith jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu upah yang pas-pasan untuk hidup.⁶⁶

b. Neo klasik (Solow-Swan)

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow (1957) mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi.⁶⁷

c. Keynesian (Harrod Domar)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya. Tingkat pertumbuhan output ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal-output. Secara lebih spesifik, bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan dan diinvestasikan, makin tinggi output.⁶⁸

⁶⁶ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2004), h. 57.

⁶⁷ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*,..., h. 62.

⁶⁸ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*,..., h. 64.

d. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “Teknologi” produksi itu sendiri. misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama.⁶⁹

4. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam

Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam

a. Serba meliputi

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan sosial.

b. Berimbang

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditunjukkan berlandaskan keadilan distribusi.

c. Realistis

Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa Islam melihat persoalan ekonomi dan social yang mungkin terjadi di masyarakat Islam dengan tawaran solusi yang juga realistis.

⁶⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*,....., h. 69.

d. Keadilan

Islam dalam menegakan hukun-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan di antara manusia.

e. Bertanggung jawab

Landasan adanya tanggung jawab sebagai salah satu fondasi paling penting diungkapkan secara jelas dan gamblang dalam syariat Islam. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa adanya tanggung jawab ada dua sisi:

- 1) Tanggung jawab antara sebagian anggota masyarakat dan sebagian golongan lainnya.
- 2) Tanggung jawab Negara terhadap masyarakat.

f. Mencukupi

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, namun tanggung jawab haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi manusia.

g. Berfokus pada manusia

Karakter ini sesuai dengan posisi manusia yang merupakan duta Allah di muka Bumi dan inilah yang mencirikan ujuan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Pertumbuhan dalam Islam ditunjukkan untuk menciptakan batas kecukupan bagi seluruh warga Negara agar ia terbebas dari segala bentuk penghambaan, baik dalam bidang finansial maupun bidang hukum, kecuali hanya penghambaan kepada Allah.⁷⁰

⁷⁰ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.127.

5. Hubungan Lembaga Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (*loanable funds*) dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa di samping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang disuatu Negara.⁷¹

Investor atau penabung muslim dapat memilih di antara tiga alternatif untuk memanfaatkan dananya (a) memegang dalam bentuk tunai (b) memegang dananya dalam bentuk asset-aset yang tidak menghasilkan pendapat atau (c) menginvestasikan dananya (menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal Negara).

Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang muslim yang menginvestasikan dana atau tabungannya tidak

⁷¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 17.

akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, karena dalam Islam semua asset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, investor Muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan danannya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan.⁷²

Faktor utama lain yang ikut mempengaruhi tingkah laku investasi dalam perekonomian Islam adalah ketidakberadaan dari suku bunga Islam melarang pembayaran bunga pada semua jenis pinjaman walaupun pinjaman-pinjaman ini dilakukan untuk teman, perusahaan swasta maupun public, pemerintah atau entitas lainnya.

Sistem keuangan Syariah menggunakan prinsip syariah yaitu prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*. sedangkan prinsip *tabi'i* adalah prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis.⁷³

Dengan demikian, sistem keuangan syari'ah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus jadi sistem keuangan syariah tidak sekedar memperhitungkan aspek *return* (keuntungan) dan resiko, namun juga ikut mempertimbangkan nilai-nilai Islam di dalamnya.

⁷² Adiwarman AKarim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 297.

⁷³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 19.

D. Ruang Lingkup Provinsi Banten

Provinsi Banten Merupakan salah satu Provinsi di Inonesia yang berada di Pulau Jawa bagian barat dengan luas 9662,92 Km². Secara astronomis, wilayah provinsi Banten terletak antara 50°70'50'' sampai dengan 07°01'01'' lintang selatan dan antara 10°50'11'' sampai dengan 10°60'712'' bujur Timur.

Wilayah provinsi Banten sebelah utara berbatasan dengan laut jawa di sebelah selatan berbatasan dengan samudera Hindia, disebelah Barat berbatasan dengan selat sunda, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI dan Jawa Barat. Dengan demikian Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis sebagai penghubung darat antara pulau jawa dan pulau sumatera.

Kabupaten dan Kota Provinsi Banten

Tabel 2.2

Kabupaten/Kota Provinsi Banten

No	Kabupaten	No	Kota
1	Pandeglang	1	Tangerang
2	Lebak	2	Cilegon
3	Tangerang	3	Serang
4	Serang	4	Tangerang Selatan

Sumber: BPS Provinsi Banten

Provinsi Banten memiliki empat kabupaten dan, yaitu kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang dan empat kota yaitu kota Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang.

Tabel 2.3.
Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas
Kabupaten Pandeglang	2746,89
Kabupaten Lebak	3426,56
Kabupaten Tangerang	1011,86
Kabupaten Serang	1734,28
Kota Tangerang	153,93
Kota Cilegon	175,50
Kota Serang	266,71
Kota Tangerang Selatan	147,19

Sumber: BPS Provinsi Banten

Dari Luas provinsi Banten 9662,92 Km², 8 (delapan) kabupaten/kota di provinsi Banten, kabupaten lebak mempunyai luas wilayah terluas yaitu 3.426,56 km² (35,45 %), sedangkan kota tanggerang selatan mempunyai wilayah terkecil yaitu 147,19 km² (1,52%).

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Provinsi Banten 2012-2015

Tahun	Jumlah Penduduk
2012	11248947
2013	11452491
2014	11704877
2015	11955243

Sumber: BPS Provinsi Banten

Sebagaimana daerah berkembang lainnya, jumlah penduduk perovinsi Banten selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk di provinsi Banten tahun 2015 sebanyak 11955243 jiwa.

Tabel 2.5
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten 20012-2015

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
<i>Kabupaten</i>				
Pandeglang	1181430	1183006	1188405	1194911
Lebak	1239660	1247906	1259305	1269812
Tangerang	3050929	3157780	3264776	3370594
Serang	3050929	1450894	1463094	1474301
<i>Kota</i>				
Tangerang	1918556	1952396	1999894	2047105
Cilegon	392341	398304	405303	412106
Serang	611897	618802	631101	643205
TangSel	1405170	1443403	1492999	1543209
Banten	11248947	11452491	11704877	11955243

Sumber: BPS Provinsi Banten

Penyebaran penduduk provinsi Banten di 8 (delapan) kabupaten / kota yang ada ternyata tidak merata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk lebih memilih tinggal di wilayah yang potensial secara ekonomi dan memiliki fasilitas umum dan social yang lebih lengkap dibanding wilayah lainnya yang masih tertinggal. Kota serang sebagai ibukota provinsi Banten hanya

mempunyai jumlah penduduk sebanyak 643209 jiwa, sementara penduduk terbesar berada di kabupaten Tangerang yaitu sebesar 3370594.

Tabel 2.6.

**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Banten 2014**

Lapangan Pekerjaan	Jumlah
Pertanian	604,998
Industri Pengolahan	1,273,015
Perdagangan rumah makan dan hotel	1,155,449
Jasa-jasa	885,348
Lainnya	935,182

Sumber: BPS Provinsi Banten

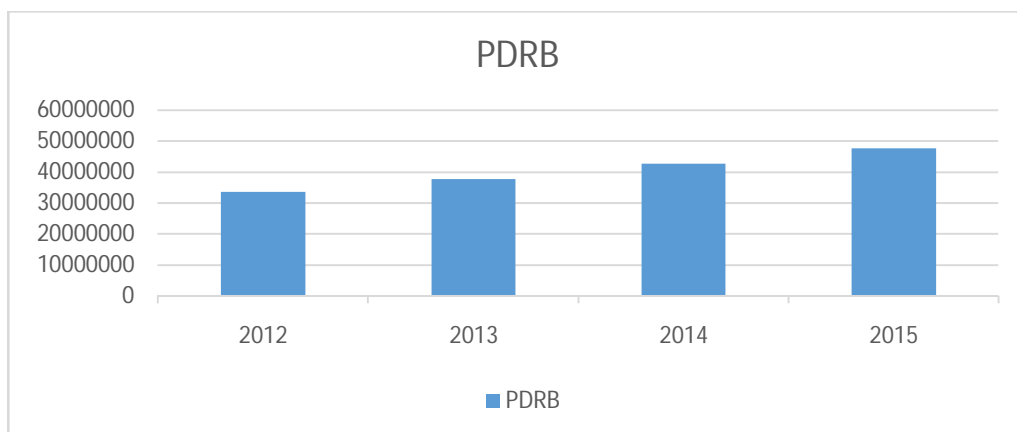
Dari sisi lapangan usaha, penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkerja di provinsi Banten pada tahun 2014 sebanyak 1,273,015 orang berkerja di sektor industri yang merupakan sektor paling banyak dibanding dengan sektor lainnya, sedangkan jumlah tenaga kerja terendah sebanyak 604,998 orang di sektor pertanian.

Tabel 2.7.

**Produk Domestik Brutto Provinsi Banten Atas Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2012-2015**

Tahun	Jumlah PDRB
2012	338,224,92
2013	377,836,08
2014	428,473,60
2015	477,936,52

Sumber: BPS Provinsi Banten

Gambar 2.1.**Grafik Produk Domestik Brutto Regional 2012-2014**

Produk Domestik Brutto provinsi Banten setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dan di pada tahun 2015 PDRB provinsi Banten atas dasar harga berlaku sebanyak 477,936,52 triliun rupiah.

Tabel 2.8.

**Produk Domestik Brutto Provinsi Banten Atas Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2012-2015**

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19635,19	2267034	2494445	2857565
Pertambangan dan Penggalian	3646,98	340462	373385	387583
Industri Pengolahan	126818,58	14094917	14842020	16002084
Pengadaan Listrik	5791,43	543789	1092822	1311399
Pengadaan Air	290,10	30716	33155	36645
Konstruksi	2923,548	34612,03	41875,07	47836,15
Perdagangan Besar dan	45310,98	48783,51	53494,36	57747,97

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
Eceran dan Reparasi Mobil dan sepeda motor				
Transportasi dan Pergudangan	23635,96	48783,51	53494,36	57747,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7717,29	8583,56	10272,28	11708,64
Informasi dan Komunikasi	13005,57	13573,11	15600,25	16923,35
Jasa Keuangan	9495,42	10883,26	11928,24	13404,44
Real Estate	24468,80	27018,15	29970,15	33608,02
Jasa Perusahaan	3152,83	3671,00	4242,91	4895,55
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6656,12	7205,52	8110,28	9279,98
Jasa Pendidikan	10593,31	11955,55	13466,69	14874,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4079,30	4393,35	4912,07	5407,61
Jasa lainnya	4691,58	5663,98	6612,29	7430,19

Sumber: BPS Provinsi Banten

Pertumbuhan ekonomi provinsi Banten berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha. Sektor ekonomi penyumbang PDRB provinsi Banten terbesar adalah sektor industri pengolahan di tahun 2015 sebesar 160,020,84, disusul sektor perdagangan besar dan kecil dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 57747,97 sama dengan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 57747,97, dan sektor konstruksi sebesar 47836,15, empat sektor ini penyumbang PDRB terbesar dibanding dengan sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.9.

**Produk Domestik Regional Brutto Provinsi Banten Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah) 2014**

Kabupaten/Kota	Jumlah PDRB
Kabupaten	
Pandeglang	18,517,65
Lebak	18,867,00
Tangerang	93,309,95
Serang	52,263,70
Kota	
Tangerang	110,920,52
Cilegon	70,445,65
Serang	20,024,77
Tangerang Selatan	51,229,66

Sumber: BPS Provinsi Banten

Kontribusi PDRB dari 8 (delapan) kabupaten/kota di provinsi Banten, pada tahun 2014 wilayah dengan PDRB tertinggi yaitu kota Tangerang sebesar 110,920,52 miliar rupiah dan di susul oleh kabupaten Tangerang sebesar 93,309,95 miliar rupiah sedangkan kabupaten Pandeglang merupakan wilayah dengan PDRB terendah yaitu sebesar 18,517,65 miliar rupiah, dan kabupaten Lebak yaitu sebesar 18,867,00 miliar rupiah.

Tabel 2.10.

**Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
Menurut Kabupaten /Kota Di Provinsi Banten 2014**

Kabupaten / Kota	Jumlah
Kabupaten Pandeglang	13
Kabupaten Lebak	20

Kabupaten / Kota	Jumlah
Kabupaten Tangerang	782
Kabupaten Serang	148
Kota Tangerang	559
Kota Cilegon	81
Kota Serang	22
Kota Tangsel	57

Sumber: BPS Provinsi Banten

Dari jumlah perusahaan industri besar dan kecil yang berada di provinsi Banten, dari 8 (delapan) kabupaten/kota perusahaan terbanyak berada di kabupaten tanggerang sebanyak 782 perusahaan industri dan kota Tangerang sebanyak 559 perusahaan industri, dan wilayah jumlah perusahaan industri terkecil berada di wilayah kabupaten Pandeglang yaitu sebanyak 13 dan kabupaten Lebak yaitu sebanyak 20 perusahaan industri hal in berkorelasi dengan jumlah kontribusi PDRB terbesar yaitu di kota Tangerang dan kabupaten Tangerang dan kontribusi PDRB terkecil yaitu kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak.

Perkembangan Perbankan Syariah di Provinsi Banten

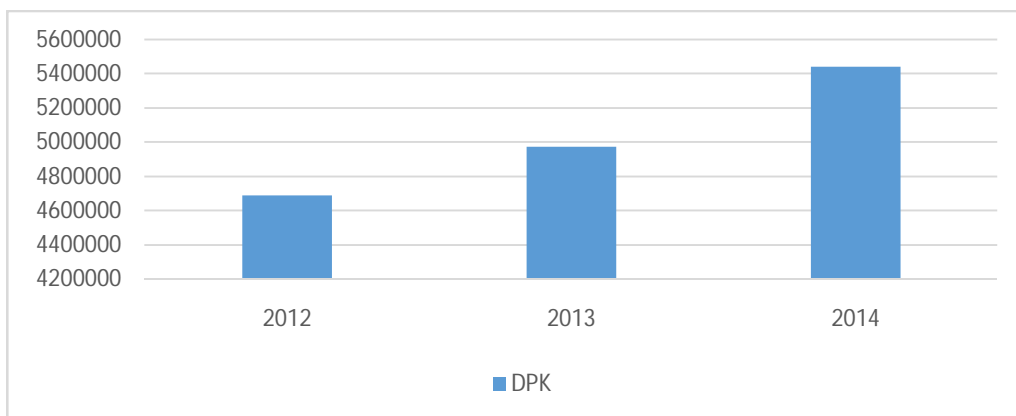
Tabel 2.11.

Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Banten Tahun 2012-2013

Tahun	Jumlah
2012	46,918,12
2013	49,754,78
2014	54,435,50

Sumber: Kajian Regional Banten

Gambar 2.2.
Grafik Perkembangan Total Dana Pihak Bank Syariah Di Banten
Tahun 2012-2013



Jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah yang terdiri giro wadiah, deposito mudharabah dan tabungan wadiah dan mudharabah di provinsi Banten dari tahun 2012 – 2014 selalu mengalami peningkatan, dan di tahun 2104 mencapai 54,435,50 miliar rupiah. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Provinsi Banten.

Tabel 2.12.

Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Provinsi Banten (miliar rupiahTahin 2012-2014)

Tahun	Jumlah
2012	69,606,43
2013	89,779,47
2014	102,928,89

Sumber: Kajian Regional Banten

Gambar 2.3.
Grafik Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah
di Provinsi Banten



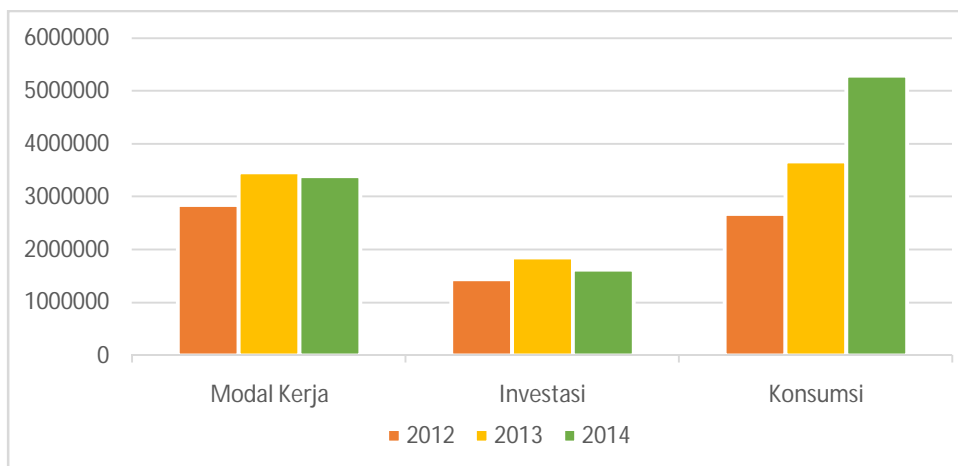
Dana yang terkumpul dari masyarakat disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di provinsi Banten di tahun 2012 – 2014 selalu meningkat hal ini dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga di perbankan syariah.

Tabel 2.13.
Posisi Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Jenis Penggunaan
di Provinsi Banten Tahun 2012-2014

Tahun	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
2012	28,475,12	14,368,07	26,763,24
2013	34,569,50	18,499,48	36,710,49
2014	33,828,15	16,264,06	52,836,68

Sumber: Kajian Regional Banten

Gambar 2.4.
Grafik Posisi Pembiayaan Perbankan Syariah
Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Banten



Menurut jenis penggunaannya pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi, berdasarkan jumlah terbanyak penyaluran pembiayaan di gunakan untuk konsumsi yaitu di tahun 2014 sebesar 52,836,68 yang kedua penyaluran pembiayaan pada modal kerja yaitu di tahun 2014 sebesar 33,828,15, dan yang terendah disalurkan untuk investasi yaitu di tahun 2014 sebesar 16,264,06.

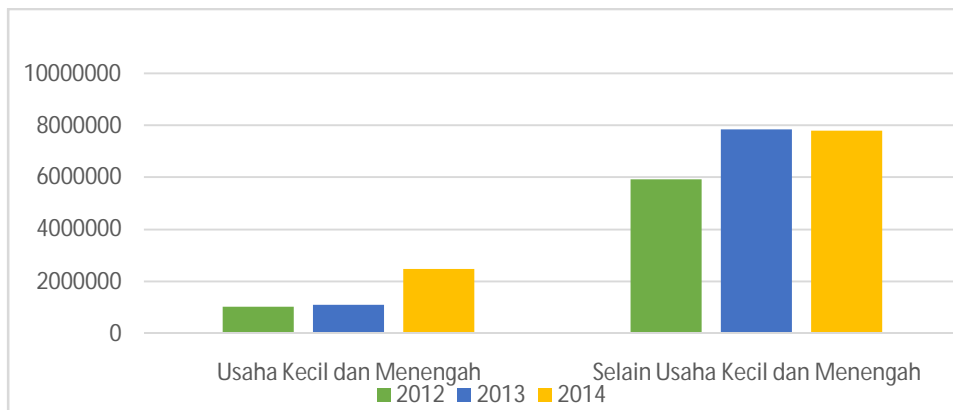
Tabel 2.14.

Posisi Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Golongan
Pembiayaan di Provinsi Banten Tahun 2012-2014

Tahun	Usaha Kecil Menengah	Selain Usaha Kecil Menengah
2012	10,346,6 (14,86%)	59,259,82 (85,14%)
2013	11,114,72 (12,38%)	78,664,75 (87,62%)
2014	24,808,15 (24,10%)	78,120,74 (76,90%)

Sumber: Kajian Regional Banten

Gambar 2.5.
Grafik Posisi Pembiayaan Perbankan Syariah
Menurut Golongan Pembiayaan di Provinsi Banten



Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berdasarkan golongan yaitu untuk usaha kecil menengah dan selain usaha kecil menengah, dari pembiayaan yang diberikan kepada selain usaha kecil menengah mempunyai porsi lebih banyak dibanding dengan pembiayaan yang disalurkan kepada usaha kecil menengah. Kontribusi perbankan syariah di provinsi Banten terhadap pembiayaan usaha kecil menengah di tahun 2012 sebesar 10,346,6 atau (14,86%) ditahun 2013 11,114,72 atau (12,38%) ditahun 2013 walupun berdasarkan jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat dari tahun 2012 tetapi kontribusi yang diberikan dari jumlah pembiayaan yang disalurkan di tahun 2013 menurun yaitu sebesar 11,114,72 (12,38%) dan ditahun 2014 penyaluran pembiayaan yang di salurkan untuk usaha kecil menengah meningkat kembali yaitu sebesar 24,808,15 atau (24,10%).

E. Hipotesis

Hipotesis 1 (H_1)

1. Hipotesis statistik uji parsial yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_i = 0$ artinya terdapat pengaruh signifikan secara parsial (terpisah) antara X (Jumlah Dana Pihak) atau X (Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah) terhadap Y_1 (Jumlah Pembiayaan Sektor UMKM) dan Y_2 (Pertumbuhan Ekonomi).

$H_0 : \beta_i \neq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial (terpisah) antara X (Jumlah Dana Pihak Ketiga) atau X (Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah) terhadap Y_1 (Pembiayaan Sektor UMKM) dan (Y_2 Pertumbuhan Ekonomi).

2. Hipotesis statistik uji simultan yang digunakan adalah:

$H_0 : \rho = 0$ artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) antara kelompok X_1 (Jumlah Dana Pihak Ketiga) dan X_2 (Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah) terhadap Y_1 (Pembiayaan Sektor UMKM) dan Y_2 (Pertumbuhan Ekonomi).

$H_0 : \rho \neq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) antara kelompok X_1 (Jumlah Dana Pihak Ketiga) dan X_2 (Jumlah Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah) terhadap Y_1 (Pembiayaan Sektor UMKM) dan Y_2 (Pertumbuhan Ekonomi).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menganalisis laporan keuangan Regional Provinsi Banten yaitu laporan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan laporan perbankan Provinsi Banten yang dipublikasikan. Adapun data yang dianalisis adalah laporan keuangan yang terdiri dari jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah Provinsi Banten, jumlah penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah Provinsi Banten dan jumlah penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM Perbankan Syariah Provinsi Banten dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDRB) Periode laporan yang digunakan yaitu laporan keuangan bulanan periode Januari 2012-2014. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan statistik melalui aplikasi SPSS17.0 windows.

Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di provinsi Banten karena 98 persen penduduk Banten adalah beragama Islam, dan berkembangnya perbankan syariah di provinsi Banten maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di provinsi banten untuk melihat perkembangan perbankan syariah yang dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan dan bagaimana kontribusinya terhadap perkembangan pembiayaan pada sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten.

B. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan, sedangkan penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data, serta menyimpulkan, dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah, penelitian ilmiah merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Karena cara penelitian hanya akan menarik dan membenarkan suatu kesimpulan. Apabila sudah ada bukti-bukti yang meyakinkan, melalui prosedur yang sistematis dan jelas, serta telah diuji kebenarannya.⁷⁴

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.⁷⁵

Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif

⁷⁴ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta;UIN Maliki, 2010), h. 31.

⁷⁵ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*,...h. 171.

akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.⁷⁶

Data yang digunakan adalah data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.⁷⁷ Dalam penelitian ini di ambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan pada situs www.BPSBanten.co.id, www.bi.go.id. dan www.ojk.go.id.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka dibutuhkan data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan cara studi dokumentasi, yaitu menelaah dokumen yang diperlukan pada objek penelitian, data yang telah terkumpul didistribusikan untuk kemudian dianalisis.

Selain pengumpulan dokumen laporan keuangan penulis juga melakukan beberapa teknik pengumpulan data. Penelitian normatif (*library research*), dalam hal ini penulis membaca dan mempelajari teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah pokok pembahasan melalui buku-buku referensi, penelitian terdahulu, jurnal, artikel, internet dan media lainnya yang berhubungan dengan media ini.

⁷⁶ Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 5.

⁷⁷ Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*.... h, 38.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel independen (variabel X) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Variabel independen dalam penelitian ini adalah (X1) jumlah dana pihak ketiga dan (X2) penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah Provinsi Banten.

Variabel dependen (variabel Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini adalah (Y1) penyaluran pembiayaan sektor UMKM dan (Y2) pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB.

F. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model regresi yaitu analisis yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti memiliki distribusi probabilistik. Variabel bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang).⁷⁸

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel *dependent* (terikat) dapat diprediksikan (meramalkan) melalui variabel *independent* (bebas) secara persial ataupun secara bersama-sama (simultan). Analisis regresi dapat digunakan untuk

⁷⁸ Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h. 101.

kebijakan apakah ingin menaikkan atau menurunkan variabel *independent*.⁷⁹

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda berganda, yaitu hubungan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan antara variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas (X_1, X_2, X_3) dalam suatu persamaan linier.

Di dalam penelitian ini ada dua model persamaan karena terdapat dua variabel terikat (Y_1 dan Y_2). Persamaan regresi linier berganda:

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 \text{ dan } Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Y_1, Y_2 = variabel dependen

X_1, X_2 = variabel Independen

a = konstanta, perpotongan garis pada sumbu X_1

b_1, b_2 = koefisien regresi⁸⁰

Agar model regresi berganda yang penulis gunakan dapat diinterpretasikan dengan baik, maka harus menggunakan asumsi *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

1. Uji asumsi klasik⁸¹

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu

⁷⁹ Riduwan Adun Rusyana, *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*, (Bandung:Alphabeta, 2011), h. 93.

⁸⁰ Trihendradi, *Analisis Data Statistik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h. 213.

⁸¹ Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: Media Kom, 2010), h. 81-87.

variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Kemudian, apakah pentingnya memiliki data yang berdistribusi normal? Data yang mempunyai distribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya *parametric test*. Uji normalitas data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode statistik diterapkan.

b. Uji Heteroskedastisita

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamat pada model regresi. Uji heteroskedastisitas di gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi.

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan di mana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Ada beberapa metode pengujian yang biasa digunakan di antaranya:

- 1) Dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.
- 2) Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2) dan

3) Dengan melihat nilai *Eigenvalue* dan *Condition Index* Uji Autokorelasi

d. Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika d lebih kecil dari d_L atau lebih besar dari $(4-d_L)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara d_U dan $(4-d_U)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara d_L dan d_U atau di antara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasif.

Nilai d_U dan d_L dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya variabel yang menjelaskan. Rumus uji Durbin Watson:

$$d = \frac{\sum(e_n - e_{n-1})^2}{\sum e_x^2}$$

Keterangan:

d = nilai Durbin Watson

e = residual

2. Pengujian Hipotesis t (t-test)

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak.⁸² Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dengan taraf kepercayaan atau taraf signifikansi sebesar 5 persen (0.05). Adapun t hitung dapat dicari dari hasil perhitungan SPSS dan t tabel dapat dicari dari tabel t . dengan kesimpulan hasil uji sebagai berikut:

- a. Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $\text{Sig. } t < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $\text{Sig. } t > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji regresi secara bersamaan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1-R^2) / (n-k-1)}$$

Dimana: R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = Jumlah variabel independen

⁸² Nachrowi Djalal, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 24.

Menentukan F tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) atau $3-1=2$ dan df 2 ($n-k-1$) (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen).

Kriteria pengujian: H_0 diterima bila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

H_0 ditolak bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ ⁸³

4. Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Angka koefisien yang dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antar variabel *dependent* dan variabel *independent*. Berikut pedoman interpretasi koefisien korelasi:

Tabel 3.1
Interpretasi Koefisien Korelasi⁸⁴

0,00-0,20	Korelasi keeratan sangat lemah
0,21-0,40	korelasi keeratan lemah
0,41-0,70	korelasi keeratan kuat
0,71-0,90	korelasi keeratan sangat kuat
0,91-0,99	korelasi keeratan sangat kuat sekali
1,00	berarti korelasi keeratan sempurna

Koefisien korelasi dapat kita cari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

⁸³ Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS...*, h. 67.

⁸⁴ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2009), h. 40.

$$R_{y.x_1x_2} = \frac{\sqrt{(ryx_1)^2 + (ryx_2)^2 - 2(ryx_1)(ryx_2)(rx_1x_2)}}{\sqrt{1 - (rx_1x_2)^2}}$$

Keterangan

r = Koefisien Korelasi

X₁ = Jumlah dana Pihak ketiga (DPK)

X₂ = Jumlah penyaluran pembiayaan

Y₁ dan Y₂ = Pembiayaan sektor UMKM dan Pertumbuhan ekonomi PDRB

n = jumlah sampel penelitian

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara X dan Y. setelah angka koefisien korelasi *pearson product moment* diperoleh maka untuk mengetahui hubungan antara variabel tersebut (tingkat keeratan atau tingkat tinggi rendahnya) harus dikonsultasikan dengan batas-batas nilai r (korelasi) sebagai berikut: $-1 < r < 1$

(-) berarti terdapat hubungan terbalik antara variabel X dan variabel Y

(+) berarti terdapat hubungan searah antara variabel X dan variabel Y

Adapun interpretasi dari koefisien korelasi adalah:

- a) Apabila $r = 1$, hubungan (X) dan (Y) sempurna secara positif dan apabila mendekati hubungannya sangat kuat dan positif.
- b) Apabila $r = -1$, hubungan (X) dan (Y) sempurna secara negatif dan apabila mendekati hubungannya sangat kuat dan negatif.

c) Apabila $r = 0$, maka kualitas (X) dan (Y) tidak ada hubungan.

5. Koefisien Determinasi (R Square atau R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen Jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap variabel dependen jumlah pembiayaan sektor *UMKM* dan pertumbuhan Ekonomi (*PDRB*). Bersarnya koefisien determinasi didapat dari mengkuadratkan koefisien korelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Data

Data yang digunakan peneliti adalah data time series laporan keuangan BI 2012-2014 yaitu jumlah dana pihak ketiga (X1) dan jumlah penyaluran pembiayaan (X2), jumlah pembiayaan sektor UMKM (Y1) dan laporan Bps provinsi Banten pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y2).

Tabel 4.1.
Data Variabel X

No	DPK (X1) (dalam miliar rupiah)	Pembiayaan (X2) (dalam miliar rupiah)
1	4,511	3,721
2	4,362	3,711
3	4,535	3,772
4	3,836	4,846
5	4,656	3,884
6	4,001	4,944
7	5,134	4,483
10	5,283	4,232
11	5,385	4,423
12	5,537	4,698
13	5,318	4,765
14	5,649	4,908
15	5,651	5,031
16	5,399	5,008
18	5,321	5,449
19	5,323	5,261
20	5,638	5,361
21	5,643	5,447
22	5,661	6,515

No	DPK (X1) (dalam miliar rupiah)	Pembiayaan (X2) (dalam miliar rupiah)
23	5,381	5,613
24	5,483	5,803
25	5,416	5,793
26	5,442	5,861
27	5,043	5,541
28	4,783	5,587
29	4,783	5,587
30	4,783	5,587
31	4,783	5,587
32	4,783	5,587
33	4,783	5,587
34	5,856	5,877
35	5,624	5,913
36	5,444	5,791

Tabel 4.2.

Descriptive Statistics Jumlah Dana Pihak Ketiga

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah DPK	33	3836	5856	5128.18	507.650
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.2. diperoleh nilai terendah jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah yang terhimpun adalah sebesar 3.836 miliar rupiah, jumlah maksimum dana pihak ketiga perbankan syariah yang terhimpun adalah sebesar 5,856 miliar rupiah dan rata-rata jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun di perbankan syariah provinsi Banten adalah sebesar 5,128,18 miliar rupiah.

Tabel 4. 3.***Descriptive Statistics Jumlah Penyaluran Pembiayaan***

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Penyaluran Pembiayaan	33	3711	6515	5156.76	717.788
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.3. diperoleh nilai terendah jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan adalah sebesar 3.711 miliar rupiah, jumlah maksimum penyaluran pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan adalah sebesar 6,515 miliar rupiah dan rata-rata jumlah penyaluran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah provinsi di Banten adalah sebesar 5,156,76 miliar rupiah.

Tabel 4.4.**Data Variabel Y**

NO	Sektor UMKM (Y1) (dalam miliar rupiah)	PDRB (Y2) (dalam jutaan ribu rupiah)
1	2,084	169,454,2
2	2,097	169,454,2
3	2,162	169,454,2
4	2,185	174972,1
5	2,201	174,972,1
6	2,287	174,972,1
7	2,256	181,666,5
10	1,941	181,666,5
11	2,097	181,666,5
12	2,264	183,550,3

NO	Sektor UMKM (Y1) (dalam miliar rupiah)	PDRB (Y2) (dalam jutaan ribu rupiah)
13	2,343	183,550,3
14	2,382	183,550,3
15	2,523	192,274,7
16	2,504	192,274,7
18	2,881	192,274,7
19	2,929	198,321,6
20	2786	198,321,6
21	2,863	198,321,6
22	2,857	213,059,3
23	5,864	213,059,3
24	2,921	213,059,3
25	2,909	218,851,0
26	2,929	218,851,0
27	2,718	218,851,0
28	2,773	225,740,8
29	2,773	225,740,8
30	2,773	225,740,8
31	2,773	232,630,5
32	2,773	232,630,5
33	2,773	232,630,5
34	1,906	239,520,2
35	1,906	239,520,2
36	1,752	239,520,2

Tabel 4.5.

Descriptive Statistics Jumlah Pembiayaan Sektor UMKM

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah pembiayaan Sektor UMKM	33	1752	5864	2581.36	693.038

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah pembiayaan Sektor UMKM	33	1752	5864	2581.36	693.038
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.5.1 diperoleh nilai terendah jumlah pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan untuk sektor UMKM adalah sebesar 1.752 miliar rupiah, jumlah maksimum penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM adalah sebesar 5,864 miliar rupiah dan rata-rata jumlah penyaluran pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM oleh perbankan syariah di provinsi Banten adalah sebesar 2,581,36 miliar rupiah.

Tabel 4.6.

Descriptive Statistics Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	33	1694542	2395202	2.03E6	236412.559
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.6. diperoleh nilai terendah Produk Domestic Brutto Regional (PDRB) Provinsi Banten adalah sebesar 1694542 miliar rupiah, jumlah maksimum pendapatan Produk Domestic Brutto Regional adalah sebesar 2395202 miliar rupiah dan rata-rata jumlah pendapatan Produk Domestic Brutto Regional (PDRB) di provinsi Banten adalah sebesar 2.030.006 miliar rupiah.

B. Uji Persyaratan Uji Hipotesis

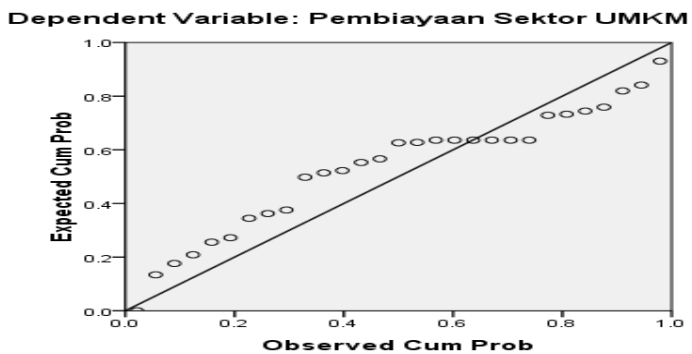
Agar hasil analisis data dapat diinterpretasikan dengan baik, maka menggunakan asumsi Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) yaitu dengan menguji Asumsi Klasik terlebih dahulu.

1. Uji Normalitas Uji Normalitas

Gambar 4.1.

Normal Probability Plot untuk H₁

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

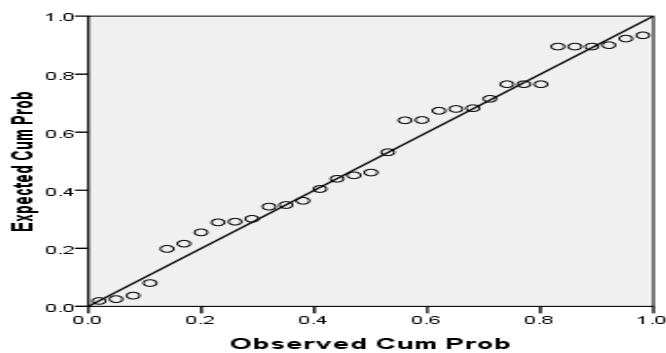


Gambar 4.2.

Normal Probability Plot untuk H₂

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)



Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

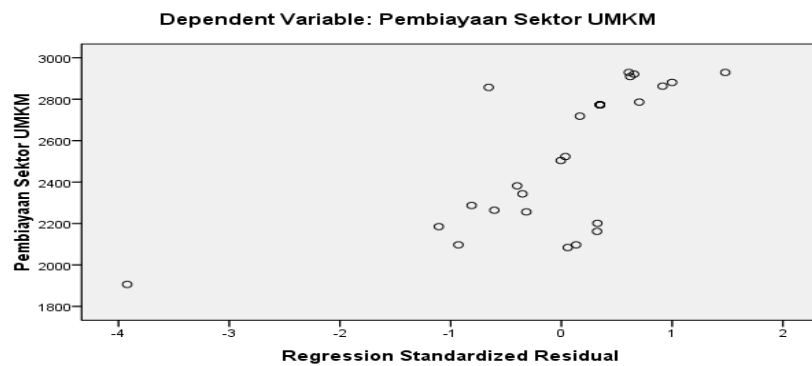
Pada gambar normal probability plots di atas titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.3.

Normal Probability Plot untuk H₁

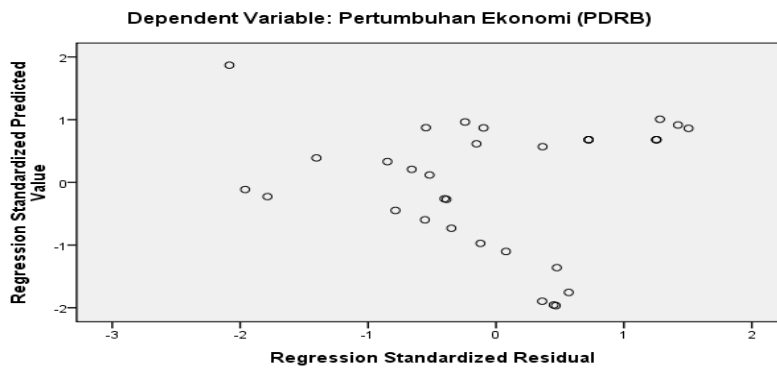
Scatterplot



Gambar 4.4

Normal Probability Plot untuk H₂

Scatterplot



Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Dari gambar di atas untuk pengujian hipotesis satu dan dua terlihat ada sebaran data di sekitar nilai 0, serta tidak tampak adanya suatu pola tertentu sehingga pada sebaran data tersebut, dapat dikatakan model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas

Dan dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi berganda.

3. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.7.

Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF	Hasil	Kesimpulan
X1	0.801	1.249	Tol > 0.1, VIF < 10	Bebas Multikolinieritas
X2	0.801	1.249	Tol > 0.1, VIF < 10	Bebas Multikolinieritas

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Hasil uji melalui VIF diperoleh nilai VIF sebesar 1.249 dan nilai *tolerance* sebesar 0.801 dari variabel di atas menunjukkan bahwa variabel memiliki nilai VIF yang tidak lebih dari 10, dan *tolerance* tidak kurang dari 0.1 yang berarti bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian.

4. Uji Autokorelasi

Hasil Pengolahan Data Uji Autokorelasi, dari hasil analisis menggunakan SPSS Versi 16.0 diketahui angka DW sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Uji Durbin-Waston

Variabel	DW	d _L	d _U	4 - d _U	Kesimpulan
Pembiayaan UMKM	1.190	1.30	1.13	2.87	Bebas Autokorelasi
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	0.975	1.30	1.13	2.87	Terdeteksi Autokorelasi positif

Sumber: Data sekunder yang diolah; 2016

Nilai Darwin Watson (DW) yang didapat pada penelitian ini adalah 1.190 dan 0.975, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikan 5 persen dengan jumlah sampel 33 jumlah variabel penerang (K) 2, jadi didapat nilai d_L dan d_U masing-masing adalah 1.30 dan 1.13.

Dengan nilai d_U sebesar 1,13 dan 4 - d_U sebesar 2,87 maka dapat kita lihat hasil dari tabel di atas bahwa tidak terdapat autokorelasi pada variabel pembiayaan sektor UMKM yang berarti tidak ada kesalahan (*errors*) suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya karena nilai DW berada di antara d_U dan 4-d_U yaitu $1.13 < 1.190 < 2.87$. Sedangkan pada variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) terdeteksi Autokorelasi Positif karena nilai DW berada di antara 0 dan d_L, yaitu $0 < 0.975 < 1.30$.

Untuk menanggulangi pengaruh autokorelasi, penulis menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) yaitu dengan cara mengestimasi persamaan regresi sampai memperoleh persamaan yang tidak mengandung masalah autokorelasi. Adapun

persamaan regresi yang sudah diestimasi terdapat pada lampiran. Di bawah ini tabel model summary dari persamaan regresi yang sudah diestimasi yang menampilkan hasil uji DW sebagai berikut:

Tabel 4.9.

Uji Durbin-Waston

Variabel	DW	d_U	$4 - d_U$	Kesimpulan
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	2.558	1.13	2.87	Bebas Autokorelasi positif

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Dilihat dari tabel di atas nilai Durbin Watson DW naik menjadi 2.558, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikan 5 persen jumlah sampel 33 jumlah variable penerang (k) 2, jika didapat nilai d_L dan d_U masing-masing adalah 1,30 dan 1.13. Dari perhitungan di atas, nilai DW adalah 2.558 nilai ini kurang dari 2.87 yang artinya hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.10.

Daerah Autokorelasi

Autokorelasi Positif	Daerah Keragu- raguan	Tidak ada autokorelasi	Daerah Keragu- raguan	Autokorelasi Negative		
0	d_L	d_U	$4 - d_U$	$4 - d_L$	4	
	<u>1,30</u>	<u>1.13</u>	2.56	<u>2.87</u>	<u>2.70</u>	<u>4</u>

C. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil analisis data penelitian jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM.

a. Pengujian Hipotesis Uji statistik t

Digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian signifikansi parameter individual (uji statistik t) variabel jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM.

Tabel 4.11

Uji Statistik T untuk H_1

Model	T hitung	T Tabel	Sig.	Kesimpulan
X1	0.082	1,697	0.936	Tidak terdapat pengaruh signifikan
X2	4.965	1,697	0.048	Ada pengaruh signifikan

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Dari hasil di atas didapat nilai t hitung sebesar 0.082 dan 4.965 selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0.05 dan untuk derajat kebebasan (df) = $n-k-1(33-2-1) = 30$, maka di dapat t tabel = 1.697. dengan kriteria pengujian apabila t hitung < t tabel maka H_0 diterima, dan apabila $-t$ hitung < $-t$ tabel atau t hitung > t

tabel maka H_0 ditolak Ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji secara parsial antara jumlah dana pihak ketiga (X1) terhadap pembiayaan sektor UMKM

Maka hasil di atas menunjukkan $-t$ hitung = $0.082 < t$ tabel = 1.697 ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak artinya secara parsial jumlah dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM. Maka dapat disimpulkan kenaikan pada jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun di perbankan syariah tidak mempengaruhi terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan pada sektor UMKM.

Uji secara parsial antara jumlah penyaluran pembiayaan (X2) terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM

Maka hasil di atas menunjukkan t hitung $> t$ tabel = $4.965 > 1.697$ ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial jumlah penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM. T hitung positif artinya jumlah penyaluran pembiayaan berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM, bahwa setiap kenaikan jumlah penyaluran pembiayaan yang disalurkan maka jumlah penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM akan meningkat.

- b. Uji secara simultan atau bersamaan (Uji F) antara jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan

syariah terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM provinsi Banten.

Rumusan Hipotesis:

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan secara bersama-sama terhadap jumlah pembiayaan UMKM.

H_1 : Ada pengaruh secara signifikan antara jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah secara bersama-sama terhadap jumlah pembiayaan UMKM.

Tabel 4.12.

Uji Statistik F untuk H_1

F tabel	F hitung	Sig.	Hasil	Kesimpulan
3.316	15.330	0.000 ^a	F hitung > F tabel, Sig. > α	H_0 ditolak dan H_a diterima

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Dari tabel di atas dapat nilai F hitung sebesar 15.330 untuk mengetahui pengaruh secara simultan harus dibandingkan dengan F tabel maka F tabel didapat dari df 2 (n-k-1) atau (33-2-1) = 30 maka hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3.316 (lihat pada lampiran).

Maka hasil di atas menunjukkan F hitung > F tabel 15.330 > 3.316 yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima maka dapat disimpulkan jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM di provinsi Banten.

Untuk mengetahui hubungan antara jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan terhadap pembiayaan sektor UMKM maka digunakan uji koefisien korelasi.

c. Uji Koefisien Korelasi

Tabel 4.13.

Koefisien Korelasi H_1

Variabel	R
Jumlah Pembiayaan sektor UMKM	0.736

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Berdasarkan hasil output di atas dapat diketahui nilai R sebesar 0.736 karena nilai korelasi ganda berada di antara 0.71-0.90, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara jumlah dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM.

d. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.14.

Koefisien Determinasi H_1

Variabel	R Square (R^2)
Jumlah Pembiayaan Sektor UMKM	0.541

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 0.541 yang artinya 54.1%, bahwa perubahan pada variabel jumlah penyaluran pembiayaan (Y_1) sebesar 54.1 % dipengaruhi oleh

perubahan pada variabel pengumpulan dana pihak ketiga(X1) dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah (X2) maka dapat disimpulkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independent (jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan) terhadap variabel dependen Y1 (jumlah pembiayaan sektor UMKM) sebesar 54.1% sedang sisanya sebesar 45,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Hasil analisis data penelitian jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

- a. Uji signifikansi parameter individu (uji statistik t) variabel jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB)

Tabel 4.15.

Uji Statistik T untuk H₂

Model	T hitung	T Tabel	Sig.	Kesimpulan
X1	1.875	1,697	0.07	Ada pengaruh tidak signifikan
X2	2.557	1,697	0.01	Ada pengaruh signifikan

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Uji secara parsial antara jumlah dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan ekonomi.

Maka hasil di atas menunjukkan $t \text{ hitung} = 1.875 > t \text{ tabel} = 1.697$ ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial jumlah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). T hitung positif artinya jumlah dana pihak ketiga berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), ketika jumlah dana pihak ketiga meningkat maka tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan meningkat.

Uji secara parsial antara penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Maka hasil di atas menunjukkan t hitung $>$ t tabel = $2.557 > 1.697$ ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial jumlah penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). T hitung positif artinya jumlah penyaluran pembiayaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ketika jumlah penyaluran pembiayaan meningkat maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan meningkat.

- b. Uji secara simultan atau bersamaan (Uji F) antara jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Banten.

Rumusan Hipotesis:

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

H_1 : Ada pengaruh secara signifikan antara jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Tabel 4.16.
Uji Statistik F untuk H₂

F tabel	F hitung	Sig.	Hasil	Kesimpulan
3.316	3.758	0.035 ^a	F hitung > F tabel, Sig. < α	H ₀ ditolak dan H _a diterima

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Dari tabel di atas di dapat nilai F hitung sebesar 3.758 untuk mengetahui pengaruh secara simultan harus dibandingkan dengan F tabel maka F tabel didapat dari df 2 (n-k-1) atau (33-2-1) = 30 maka hasil diperoleh untu F tabel sebesar 3.316 (lihat pada lampiran).

Maka hasil di atas menunjukkan F hitung > F tabel yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima dapat disimpulkan jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Untuk melihat tingkat hubungan antara jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) menggunakan uji Koefisien Korelasi.

c. Uji Koefisien Korelasi

Tabel 4.17.
Koefisien Korelasi H₂

Variabel	R
Jumlah Pembiayaan sektor UMKM	0.45

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Berdasarkan hasil output di atas dapat diketahui nilai R sebesar 0.454. karena nilai korelasi ganda berada di antara

0.40-0.59, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara jumlah dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

d. Uji Koefisien Determinasi (R square)

Tabel 4.18.

Koefisien Determinasi H₂

Variabel	R Square (R ²)
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	0.206

Sumber: data sekunder yang diolah; 2016

Koefisien determinasi Nilai R² (R square) digunakan untuk melihat seberapa jauh variabel independen menerangkan variabel dependen.

Diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 0.206 untuk persamaan yang kedua. yang artinya 20.6%, dapat diartikan bahwa perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar 20.6 % dipengaruhi oleh perubahan pada variabel X1 dan X2 maka dapat disimpulkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independent (jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan) terhadap variabel dependen Y2 (pertumbuhan ekonomi PDRB) sebesar 20.6% sedang sisanya sebesar 79,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai hasil analisis yang telah dilakukan. Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah pembiayaan Sektor UMKM

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS dengan variabel dependen jumlah pembiayaan sektor UMKM, bahwa hasil dari uji hipotesis uji t secara parsial menyatakan bahwa antara jumlah dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM tidak terdapat pengaruh karena nilai t hitung $< t$ tabel ($0.080 < 1.697$). dari hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa jumlah peningkatan DPK perbankan syariah di provinsi Banten tidak mempengaruhi terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM yang di salurkan oleh perbankan syariah, dan di dasarkan hasil penelitian data pada tabel (14.4) jumlah kontribusi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan golongan pembiayaan pada sektor UMKM masih relative lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan pada sektor non UMKM. Tetapi dalam jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM berpengaruh karena nilai t hitung $> t$ tabel = $4.965 > 1.697$ ini artinya bahwa pengaruh positif, jumlah pembiayaan yang disalurkan mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah pembiayaan sektor UMKM. Dan secara simultan bersama-sama menghasilkan nilai F hitung $> F$ tabel $15.330 > 3.316$ yang

artinya H_0 ditolak dan H_a diterima berarti terdapat pengaruh secara simultan. Maka dapat disimpulkan peran perbankan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM. besaran pengaruh diperoleh dari hasil koefisien determinasi sebesar 0.541 atau 54.1%, yang artinya bahwa perubahan pada variabel jumlah pembiayaan sektor UMKM (Y1) dipengaruhi oleh jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan

2. Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Penyaluran Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS dengan variabel dependen pertumbuhan Ekonomi (PDRB), bahwa hasil dari uji hipotesis uji t secara parsial menyatakan bahwa antara jumlah dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) terdapat pengaruh karena nilai t hitung > t tabel = 1.875 > t tabel = 1.697 dan t hitung > t tabel = 2.557 > 1.697 yang artinya bahwa setiap kenaikan pada jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan maka akan meningkatkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pendapatan Produk Domestic Brutto (PDRB) dan hasil secara simultan atau bersama-sama di dapat nilai F hitung > Ftabel atau 3.758 > 3.316. artinya bahwa perkembangan perbankan syariah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan di provinsi Banten. Besaran pengaruh diperoleh dari hasil koefisien determinasi sebesar 0.206 artinya 20.6%, perubahan

pada pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y) sebesar 20.6 % dipengaruhi oleh perubahan pada variabel X1 dan X2. Artinya bahwa pengembangan perbankan syariah dan industri keuangan adalah salah satu pilihan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor riil di Banten. Tingkat jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di provinsi Banten berperan secara signifikan dalam menjelaskan peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah menjadi perbankan yang efektif menghubungkan dan menstransfer sumber-sumber keuangan pada sektor-sektor ekonomi di provinsi Banten.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah diupayakan pelaksanaannya secara maksimal, namun tentu tidak akan lepas dari kehilangan, kelemahan dan kekurangan. Hal ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Penelitian yang dilakukan peneliti ini menemukan keterbatasan, di antaranya: biaya, waktu dan faktor disiplin kerja yang mengharuskan penulis untuk pandai berbagi waktu dan tenaga dalam penyusunan penelitian ini.
2. Kedalaman dan cakupan materi yang menurut penulis masih jauh dari kesempurnaan.
3. Penelitian ini hanya dibatasi pada kajian ekonomi secara makro antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan menggunakan beberapa uji statistik, penelitian ini mengeksplorasi secara empiris pengaruh perkembangan sektor keuangan khususnya perbankan syariah dengan menggunakan nilai jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan dan pengaruhnya terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) selama periode 2012 sampai 2014. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis secara parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara X1 dan X2 terhadap Y1 dan Y2 dan uji hipotesis secara bersama-sama atau simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel X1, X2 terhadap Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM secara parsial hanya jumlah penyaluran pembiayaan yang berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM. Yang dibuktikan dengan uji hipotesis (uji t) secara parsial X1 terhadap Y1 = $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.082 < 1,697$) dan X2 terhadap Y1 = $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.965 > 1,697$). Secara simultan terdapat pengaruh antara jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM yang dibuktikan dengan uji simultan (uji F) = $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($15.330 > 3.316$)

maka H_0 di tolak dan H_a di terima artinya dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan sektor UMKM.

2. Pada jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di provinsi Banten secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang dibuktikan dengan uji hipotesis (uji t) yaitu X_1 terhadap $Y_2 = t$ hitung $t > t$ tabel ($1.875 > 1.697$) dan X_2 terhadap $Y_2 = t$ hitung $t > t$ tabel ($2.557 > 1.697$) dan secara simultan atau bersama-sama jumlah dana pihak ketiga dan jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang dibuktikan dengan uji simultan uji F = F hitung $> F$ tabel ($3.758 > 3.316$) maka H_0 ditolak dan H_a di terima artinya jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).
3. Besar pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah pembiayaan sektor UMKM dengan uji koefisien determinasi (R square) sebesar 0.541 atau 54.1%, besar pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) uji koefisien determinasi (R square) sebesar 0.206 atau 20.6%. Hasil penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa kehadiran perbankan syariah tidak hanya secara teoritis dan idiologis mendinamisasi aktivitas perekonomian sebuah wilayah.

Melalui hasil penelitian ini juga, perbankan syariah telah secara efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi mobilisasi modal dari unit surplus ke unit defisit, sektor ekonomi yang memiliki kelebihan modal ke sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Setelah melihat hasil penelitian ini maka diharapkan ada usaha-usaha yang berkesinambungan dari pihak pemerintah dan para pelaku perbankan syariah untuk mendorong perbankan syariah di provinsi Banten sebagai salah satu dari bagian dari sistem perbankan regional di provinsi Banten yang akan berkontribusi pada pengembangan sektor ekonomi riil di provinsi Banten. Perbankan syariah diharapkan untuk tetap konsisten pada pola pembiayaan sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini digelutinya.

Untuk memenuhi permintaan keuangan syariah yang akan meningkat maka perbankan syariah harus meningkatkan infrastruktur keuangan seperti peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan industri keuangan syariah yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan.

C. Saran-saran

1. Perbankan syariah diharapkan untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor UMKM dan konsisten pada pola pembiayaan sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena pola pembiayaan ini secara ekonomi akan berkontribusi

pada pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil.

2. Peneliti serupa selanjutnya dapat juga mengukur tingkat efisiensi perbankan syariah di provinsi Banten dan juga dapat diperluas lagi dengan meneliti akad-akad yang digunakannya dan lain-lain. Dan memperluas sampel tidak hanya terbatas pada perbankan di provinsi Banten secara keseluruhan tetapi pada kabupaten /kotanya. Dan tidak hanya perusahaan perbankan syariah saja yang dapat diteliti, dapat juga dilakukan pada perusahaan asuransi syariah, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Lembaga keuangan syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Anshori Ghofur Abdul, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Antonio Syafi'i Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, 1999.
- Arifin Bustanul, *Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : STIE YKPN, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aziz Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabet, 2010.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakti Anugrah Tri Rizki, dkk., Jurnal, Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil, Universitas Brawijaya Malang, 2013. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016 Rudianto Rizki,
- Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Alqur'an dan Terjemah Special For Woman*,
- Gatut Susanta, M Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah mendirikan dan mengelola UMKM*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

- Gazaly Rahman Abdul, et al. eds. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Huda Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Huda Nurul, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Jhingan M.L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jurnal: etikonomi, fol. 12
- Karim A Adiwarmanto Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Karim A Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 297
- Karim Adiwarmanto, *Bank Islam analisis fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kasiram Moh, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta; UIN Maliki, 2010.
- Kuncoro Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Latummaerissa Julius R, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, STIM YKPN : Yogyakarta, 2011.

- Nandar Eko Beni, *Pembiayaan Bank Riau Syariah (BPD Riau) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Rama Ali, *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi 2013.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Saiman Leonardus, *Kewirausahaan Teori, Praktik, dan Kasus-kasus*, Jakarta: Salemba empat, 2012.
- Shihab M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kkuantitatif*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Siregar veronica Sylvia, *Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP*, Universitas Indonesia, Vol 9-No 1 Juni 2012. Diakses Pada tanggal 20 Maret 2016.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Sri Maryati, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat*, Journal of Economic and Economic Education Vol 3 No1.
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta, 2014. Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2004.
- Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutedi Andriana Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tambunan T.H Tulus, *Perekonomian Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Tambunan T.H Tulus, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Tarigan Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Tarigan Robinson, *Ekonomi Regional*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

[www. Bps Banten.co.id](http://www.Bps.Banten.co.id)

www.BI.go.id

WWW.Ojk.go.id